

EVALUASI KEBIJAKAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN PADA PELAYANAN ANGKUTAN UMUM PENUMPANG DI KOTA CIMAH

Waluyo Zulfikar¹⁾, Indra Aditya Prayoga^{2)*}

(e-mail: izoel007@gmail.com¹⁾, indraadityaprayoga1@gmail.com²⁾)

(*) *Corresponding Author*

¹⁾Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

²⁾Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nurtanio Bandung

ABSTRACT

The policy regarding the implementation of transportation in Cimahi City does not specifically regulate passenger public transport services so that it is suspected to be the cause of the poor operation of passenger public transportation in Cimahi City. This study aims to analyze data and information so as to get an overview of policy evaluation regarding the implementation of transportation in Cimahi City with case studies on passenger public transport services. The method used is a case study with a qualitative approach. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation studies. Checking the validity of the data is done by triangulation. Data analysis was carried out including the stages of data reduction, data presentation, and conclusions or verification. Based on the research results, a clearer picture is obtained that passenger public transport services in Cimahi City are measured by effectiveness factors based on quality, quantity and time, efficiency of available resources, adequacy of policies in overcoming problems, equity of services and policy benefits, government responsiveness to problems arising from the implementation of policies, and the accuracy of policy targets in achieving policy objectives has not run optimally. Observing the results of the research, it is hoped that policy makers in Cimahi City will be able to review regulations and reformulate more specific policies that specifically address passenger public transport services. In addition, it is recommended to develop a Smart Passenger Public Transport System based on information and communication technology which can be used as an alternative solution.

Keywords: Policy Evaluation; Implementation of Transportation; Passenger Public Transport Services.

ABSTRAK

Kebijakan tentang penyelenggaraan perhubungan di Kota Cimahi tidak mengatur secara khusus mengenai pelayanan angkutan umum penumpang sehingga diduga menjadi penyebab buruknya penyelenggaraan angkutan umum penumpang di Kota Cimahi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data dan informasi sehingga mendapatkan gambaran mengenai evaluasi kebijakan tentang penyelenggaraan perhubungan di Kota Cimahi dengan studi kasus pada pelayanan angkutan umum penumpang. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Analisis data dilakukan meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta simpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran yang lebih jelas bahwa pelayanan angkutan umum penumpang di Kota Cimahi diukur dari faktor efektivitas berdasarkan kualitas, kuantitas, dan waktu, efisiensi sumber daya yang tersedia, kecukupan kebijakan dalam mengatasi masalah, pemerataan pelayanan dan manfaat kebijakan, responsivitas pemerintah terhadap masalah yang timbul dari pelaksanaan kebijakan, dan ketepatan sasaran kebijakan dalam capaian tujuan kebijakan belum berjalan dengan optimal. Mencermati hasil penelitian, para pemangku kebijakan di Kota Cimahi diharapkan dapat melakukan kajian ulang regulasi dan merumuskan kembali kebijakan yang lebih spesifik yang secara khusus membahas tentang pelayanan angkutan umum penumpang. Selain itu disarankan untuk melakukan pengembangan Sistem Angkutan Umum Penumpang Pintar berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dijadikan alternatif solusi.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Penyelenggaraan Perhubungan, Pelayanan Angkutan Umum Penumpang.

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang relatif cepat bila tidak diimbangi dengan pertumbuhan alat transportasi massal yang nyaman, aman, cepat, mudah diakses dan murah akan membuat masyarakat cenderung menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktivitas. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan dan perkembangan kota yang sedemikian pesat, transportasi menjadi salah satu kebutuhan vital bagi kehidupan manusia di perkotaan. Kendaraan umum sebagai salah satu sarana transportasi bukan lagi suatu pilihan tapi sudah menjadi suatu kebutuhan menunjang mobilitas, aktivitas masyarakat sehari-hari.

Untuk memenuhi kebutuhan akan transportasi umum yang berkualitas, aman dan nyaman, pemerintah Kota Cimahi mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang telah direvisi dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan, serta adanya Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 551/ Kep. 1611-Dishub/ 2019 Tentang Jaringan Trayek Perkotaan Di Wilayah Kota Cimahi, dimana salah satu babnya mengatur tentang angkutan umum penumpang, namun belum secara spesifik dapat digunakan untuk mengawasi dan sekaligus menyeleksi angkutan umum penumpang agar tercipta rasa nyaman dan jaminan keselamatan bagi penumpang.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, diketahui bahwa kebijakan tentang penyelenggaraan perhubungan di Kota Cimahi tidak mengatur secara khusus mengenai pelayanan angkutan umum penumpang sehingga diduga menjadi penyebab buruknya penyelenggaraan angkutan umum penumpang di Kota Cimahi. Adapun permasalahan yang ditemukan, di antaranya sebagai berikut:

1. Pelayanan angkutan umum penumpang di Kota Cimahi kurang efektif. Contohnya, kebanyakan sopir angkutan umum penumpang menunggu hingga mobilnya terisi penuh sehingga penumpang yang datang ketika mobilnya masih kosong harus menunggu lama hingga datang penumpang lainnya. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya jadwal perjalanan yang jelas dari kebanyakan angkutan umum penumpang di Kota Cimahi.

2. Pelayanan angkutan umum penumpang di Kota Cimahi kurang efisien. Contohnya, penumpang harus beberapa kali berganti angkutan untuk sampai ke tempat tujuan sehingga harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membayar ongkos.

3. Kebijakan yang ada saat ini belum memenuhi aspek kecukupan karena belum mampu mengatasi masalah yang terjadi dalam pelayanan angkutan umum penumpang di Kota Cimahi. Contohnya, banyaknya angkutan kota yang secara fisik tidak layak namun masih beroperasi sehingga mobil yang digunakan sebagai angkutan sering mengalami mogok dan membuat penumpang merasa tidak nyaman bahkan hingga membuat penumpang harus mencari angkutan lain untuk melanjutkan perjalanannya.

Berdasarkan latar belakang penelitian, yang menjadi pernyataan masalah (*problem statement*) dalam penelitian ini adalah: "Kebijakan tentang Penyelenggaraan Perhubungan Pada Pelayanan Angkutan Umum Penumpang di Kota Cimahi sudah tidak relevan". Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian (*research questions*) sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana evaluasi kebijakan tentang Penyelenggaraan Perhubungan pada pelayanan Angkutan Umum Penumpang di Kota Cimahi?, Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelayanan Angkutan Umum Penumpang di Kota Cimahi?, dan Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi dalam

mengatasi faktor-faktor yang menghambat pelayanan Angkutan Umum Penumpang di Kota Cimahi?

Relevansi Variabel Penelitian Dengan Administrasi Publik. Wajing dalam [Zenu \(2008:6\)](#) mengatakan administrasi publik adalah “Kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan usaha-usaha instansi pemerintah agar tujuannya tercapai”. Topik penelitian ini mengenai evaluasi kebijakan tentang Penyelenggaraan Perhubungan pada pelayanan Angkutan Umum Penumpang di Kota Cimahi, dapat dinyatakan relevan dengan administrasi publik karena hasil dari suatu kebijakan yang telah dievaluasi berdasarkan berbagai masalah dan kekurangannya dapat ditemukan rekomendasi untuk penyempurnaan dari kebijakan tersebut untuk mengatur pelayanan Angkutan Umum Penumpang di Kota Cimahi yang sebelumnya belum diatur secara spesifik pada regulasi atau kebijakan yang ada.

Evaluasi Kebijakan Publik. Evaluasi kebijakan pemerintah dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali. [Dunn \(2003:608\)](#) memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa “secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan”. Sedangkan menurut Muchsin dan Fadillah (2002:110), “evaluasi kebijakan pemerintah adalah sebagai hakim yang menentukan kebijakan yang ada telah sukses atau gagal mencapai tujuan dan dampak-dampaknya”.

Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi menurut [Dunn, \(2003:610\)](#) terdapat kriteria evaluasi sebagai berikut: (1) Efektivitas, (2) Efisiensi, (3) Kecukupan, (4) Perataan, (5) Responsivitas, dan (6) Ketepatan.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana. Sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya. Evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan.

Angkutan Umum Penumpang. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan angkutan Orang di jalan dengan kendaraan umum, ada beberapa kriteria yang berkenaan dengan angkutan umum. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada BAB X ANGKUTAN Bagian Ketiga, Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum, Paragraf 1 Umum, Pasal 140, Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas: 1) angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan 2) angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Tujuan utama keberadaan angkutan umum penumpang adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah dan nyaman. Selain itu, keberadaan angkutan umum penumpang juga membuka lapangan pekerjaan. Pengadaan pelayanan angkutan

umum penumpang memang secara langsung mengurangi banyaknya kendaraan pribadi, namun angkutan umum penumpang bukan obat mujarab untuk memecahkan persoalan lalu lintas kota. Pelayanan angkutan umum penumpang akan berjalan baik apabila tercipta keseimbangan antara kesediaan dan permintaan. ([Warpani,1990](#)).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *case study research* (studi kasus). Pemilihan Informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti ([Sugiyono, 2016:219](#)).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data adalah menurut [Miles dan Huberman \(2009:16-21\)](#), yaitu *Data Reduction* (Reduksi data), *Data Display* (Penyajian data), dan *Conclusion Drawing* atau *Verification* (Simpulan atau verifikasi).

III. PEMBAHASAN

Penelitian tentang Evaluasi Kebijakan tentang Penyelenggaraan Perhubungan dengan Studi Kasus pada Pelayanan Angkutan Umum Penumpang di Kota Cimahi dilakukan dengan mengukur tingkat keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan menggunakan faktor-faktor: Efektivitas, Efisiensi,

Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

Evaluasi Kebijakan tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Pada Pelayanan Angkutan Umum Penumpang di Kota Cimahi. Keefektifan kebijakan penyelenggaraan perhubungan dilihat dari hasil yang diinginkan dalam pengelolaan pelayanan angkutan umum penumpang di Kota Cimahi berdasarkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan dari sisi kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu diinginkan, sesuai dengan yang telah direncanakan dalam perumusan kebijakan, kelihatannya belum tercapai sesuai harapan hal itu dapat ditinjau dari masih banyaknya masyarakat yang belum memanfaatkan layanan angkutan umum yang tersedia di Kota Cimahi, Hal itu sebagai akibat tingkat minat masyarakat dalam memanfaatkan angkutan umum semakin rendah.

Kenyataan yang terjadi, peremajaan kendaraan yang tidak sesuai harapan, masih banyak angkutan umum yang sudah berumur tua yang beroperasi tidak layak jalan. Padahal pada Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, dinyatakan bahwa "Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peremajaan terhadap kendaraan angkutan umum." Kenyataan lainnya yang mengemuka, belum seluruh wilayah Kota Cimahi terlayani oleh angkutan umum, tapi di sisi sebaliknya ternyata jumlah kendaraan umum lebih banyak dibandingkan jumlah penumpang. Secara kualitas dan kuantitas layanan angkutan umum di Kota Cimahi belum merata, kemacetan masih sering terjadi, penentuan tarif yang tidak jelas. Sementara masyarakat menghendaki adanya pelayanan angkutan umum yang nyaman, aman, dan terjangkau. Dapat melayani seluruh jalan di

wilayah Kota Cimahi dan terintegrasi dengan moda angkutan umum yang lainnya.

Efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perhubungan dalam hal ini pengelolaan angkutan umum penumpang di Kota Cimahi sudah diasiasi dengan penyelesaian kemampuan SDM dan pendanaan yang harus dikeluarkan pemerintah walaupun masih banyak sumber daya yang dibutuhkan. Terdapat kenyataan bahwa instansi terkait pelaksanaan kebijakan di Kota Cimahi belum cukup padu dalam melakukan efisiensi sumber daya yang terbatas, khususnya dalam melakukan peninjauan jumlah angkutan umum penumpang pada tiap-tiap trayek untuk menghindari trayek gemuk dan trayek kurus. Penumpukan kendaraan pada trayek tertentu dan kekurangan kendaraan pada trayek lainnya. Kenyataan masih banyaknya jalan umum yang belum dilalui trayek yang ada memerlukan adanya perluasan dan atau penambahan trayek di Kota Cimahi tetapi tidak harus menambah jumlah kendaraan yang berpotensi memperparah kemacetan dan mengurangi jumlah penghasilan pengelola angkutan, karena saat ini pun penghasilan yang didapat semakin menurun. Masalah trayek ini memerlukan analisis secara mendalam, diantaranya untuk mencegah dan mengatasi *overlapping* angkutan umum.

Kecukupan esensi dan implementasi kebijakan dalam mengatasi masalah pelayanan angkutan umum penumpang di Kota Cimahi untuk dapat melayani masyarakat dengan baik, berhadapan dengan minimnya sumber daya kompeten di manajemen angkutan umum penumpang sehingga belum tampak perbaikan pelayanan angkutan umum. Pelaksanaan kebijakan oleh Dinas Perhubungan memang bisa dikatakan sudah cukup baik, hal itu tampak dari adanya kebijakan penambahan trayek baru dan moda transportasi baru dapat memecahkan banyak masalah yang dihadapi, namun sayangnya belum didukung secara optimal oleh *stake*

holder lainnya yang ada di lingkungan Pemkot Cimahi.

Pemerataan manfaat kebijakan pelayanan angkutan umum penumpang di kota Cimahi dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan tidak membeda-bedakan pelayanan dan biaya layanan kepada semua pihak, melainkan seutuhnya mengikuti aturan yang berlaku, dan biaya juga disesuaikan dengan layanan yang dibutuhkan. Manfaat kebijakan telah didistribusikan secara merata bagi masyarakat walaupun kenyataannya masih ada yang belum terlayani dengan baik, belum seluruhnya merata. Pengumuman dan surat edaran menyangkut tarif pelayanan angkutan umum penumpang sudah disampaikan ke pihak-pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat, namun terbukti masih banyak masyarakat dan pelaku usaha angkutan umum yang belum mengetahuinya. Pemerataan dari sisi kuantitas dan kualitas atas manfaat kebijakan pelayanan angkutan umum penumpang dapat dikatakan belum cukup merata.

Responsivitas pemerintah terhadap masalah kebijakan pelayanan angkutan umum penumpang di Kota Cimahi diukur dari tingkat kepekaan pemangku kebijakan dalam memberikan tanggapan yang cepat dan solutif pada permasalahan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kebijakan ternyata belum cukup memuaskan. Contohnya masih terdapat kebijakan yang masih memberatkan tanpa memperhatikan kondisi sosial ekonomi para pelaku usaha angkutan umum dan masyarakat luas. Implementasi Perda No 4 Thn 2017 tentang Perhubungan dalam Pasal 31 ayat 4 yang menyatakan bahwa masa operasional kendaraan paling lama 15 tahun, belum terealisasi dengan baik. Padahal untuk menjamin kenyamanan baik penumpang ataupun sopir angkutan umum. Kenyataannya masih banyak kendaraan yang berumur tua yang kurang layak beroperasi yang tidak segera ditertibkan.

Faktor ketepatan dari tujuan kebijakan pelayanan angkutan umum penumpang

umum di Kota Cimahi, belum tercapai sebagaimana yang ditentukan regulasi, sehingga diharapkan dapat dirumuskan kembali regulasi yang benar-benar membantu pelayanan angkutan umum agar menjadi lebih baik, selain itu juga harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, seperti misalnya dalam memberikan kemudahan proses perizinan angkutan umum penumpang dan menghilangkan atau setidaknya mengurangi jenis pungutan-pungutan yang selama ini dirasa memberatkan pengusaha angkutan umum dan masyarakat. Apabila hal tersebut dapat terealisasi akan memberikan dampak positif khususnya dalam memberlakukan tarif yang terjangkau oleh masyarakat luas dan dapat melayani masyarakat dengan lebih baik serta menyeluruh ke semua wilayah jalan di Kota Cimahi, termasuk ke wilayah jalan-jalan yang selama ini belum terlewati angkutan umum penumpang.

Faktor-faktor yang menghambat pelayanan Angkutan Umum Penumpang di Kota Cimahi. Faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pengelolaan pelayanan angkutan umum penumpang di Kota Cimahi dari segi efektivitas secara kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu, di antaranya adalah masalah anggaran pengelolaan untuk pelaksanaan kebijakan yang masih terbatas, masih rendahnya tingkat kesadaran pemilik angkutan dan para pengemudinya dalam melaksanakan aturan-aturan yang berlaku, masih berbelit-belitnya syarat proses pembayaran pajak kendaraan angkutan umum angkutan yang selalu dikaitkan oleh proses perizinan.

Di sisi lain masih sering telatnya perusahaan angkutan umum penumpang dalam melakukan uji kir secara berkala, sehingga kondisi kendaraan yang beroperasi kurang terkontrol dengan baik. Keefektifan implementasi kebijakan juga terkendala masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat, kurangnya optimalnya dukungan

pemerintah. Temuan lainnya berupa masih adanya angkutan umum yang tidak terdata, sehingga masih terdapat kendaraan tidak berizin yang beroperasi di jalanan. Akhir-akhirnya maraknya layanan perusahaan angkutan penumpang *online* cukup sulit dideteksi karena sulit membedakannya dengan kendaraan milik pribadi. Kompetensi SDM sektor angkutan umum penumpang juga menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian khusus, selanjutnya kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan, *overlapping* trayek angkot dalam kota dengan trayek AKDP, kurang memadainya sarana prasarana seperti ruas jalan yang semakin sempit, terminal dan tempat perhentian angkutan di lokasi mobilisasi tinggi seperti sekolah, rumah sakit dan pusat perbelanjaan, belum adanya regulasi yang secara khusus tentang pelayanan angkutan umum penumpang, dan penentuan tarif yang kurang terkontrol oleh petugas pengawasan Dinas Perhubungan merupakan hambatan serius dalam pencapaian efektivitas implementasi kebijakan.

Efisiensi dalam pelaksanaan regulasi mengenai pelayanan angkutan umum penumpang di Kota Cimahi berhadapan dengan sejumlah faktor penghambat. Tingkat disiplin berlalu lintas yang rendah, masih adanya tumpang tindih aturan, kurang sinerginya antar instansi terkait pelayanan angkutan umum penumpang, pemahaman poin-poin kebijakan yang rendah, terbatasnya anggaran, SDM, dan sarana prasarana yang tersedia, menjadi salah satu masalah yang menghambat efisiensi regulasi. Hal lainnya dikarenakan belum terfokusnya pelayanan penyelenggaraan angkutan umum penumpang pada satu instansi, jumlah angkutan umum penumpang yang berlebih di tiap trayek, adanya layanan angkutan umum *online*, bertambahnya jumlah kendaraan pribadi, usia kendaraan yang tua dan boros bahan bakar, kurangnya sosialisasi kebijakan, dan tidak jelasnya penentuan tarif dan waktu tempuh perjalanan merupakan masalah-

masalah yang membuat sulit melakukan efisiensi sumber daya yang tersedia.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memecahkan masalah pada pelayanan Angkutan Umum Penumpang di Kota Cimahi dilihat dari segi kecukupan pencapaian tujuan dan manfaat kebijakan, di antaranya yaitu: Banyak SDM (khususnya penyelenggara angkutan umum penumpang, misalnya sopir) yang rendah dalam memahami kebijakan, kurang lengkapnya sarana prasarana dan anggaran yang terbatas, lemahnya pelaksanaan pengawasan terhadap angkutan umum penumpang, kurangnya kesadaran pengguna layanan kebijakan dalam memperhatikan keselamatan dan ketertiban, kebijakan yang ada saat ini masih dianggap belum melindungi kepentingan angkutan umum penumpang, kendaraan umum *online* yang semakin banyak dan sulit didata, masalah perpanjangan surat-surat yang masih sulit, kurang patuhnya pengelola angkutan umum terhadap peraturan, *overlapping* trayek, belum adanya sarana transportasi masal yang terintegrasi, disiplin berlalu lintas yang masih rendah, dan lemahnya daya saing angkutan umum penumpang konvensional sehingga semakin menurunkan minat calon penumpang.

Penghambat dalam capaian pemerataan manfaat kebijakan yang diberikan untuk kelompok-kelompok angkutan umum penumpang di Kota Cimahi di antaranya: kurangnya anggaran untuk melakukan kegiatan sosialisasi, perencanaan pelayanan angkutan yang kurang matang, data yang ada mengenai pengelolaan layanan belum cukup lengkap, jumlah angkutan umum yang banyak namun trayek belum bisa melayani seluruh wilayah Kota Cimahi, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap regulasi, kurang nyamannya fasilitas dalam angkutan umum penumpang, tingkat kemacetan yang masih tinggi terutama di pusat-pusat keramaian dan pada jam sibuk, sarana prasarana yang kurang memadai secara kualitas dan kuantitas serta kurang merata ke setiap wilayah Kota Cimahi,

kurangnya kesadaran operator angkutan umum dalam menjaga kualitas layanan. Masalah lainnya yang menjadi hambatan karena sebagian besar pengelola angkutan umum dilakukan perorangan secara konvensional dengan tanpa memiliki manajemen yang memiliki kompetensi yang baik, masih terdapat oknum pengemudi yang tidak mematuhi ketentuan tarif resmi yang sudah ditentukan pemerintah, dan kurangnya sosialisasi kebijakan.

Faktor-faktor penghambat responsivitas pelaksana kebijakan terhadap pelayanan angkutan umum penumpang di Kota Cimahi, di antaranya karena angkutan umum di Kota Cimahi belum diprioritaskan dalam pembangunan sebagai fasilitas untuk melayani warga kota, antara lain karena masih ada petugas lapangan yang lalai dan kurang tanggap dalam melaksanakan tugas, Pemda Kota Cimahi dianggap belum cukup berpihak kepada angkutan umum penumpang, angkutan umum penumpang di Kota Cimahi sampai saat ini masih dianggap sebagai sumber PAD, sarana prasarana penunjang operasional angkutan umum penumpang yang masih kurang secara kualitas dan kuantitas, minimnya informasi kebijakan yang diterima masyarakat. Selain kurangnya sosialisasi hal itu juga kurang ditunjang oleh sistem informasi dan komunikasi yang memadai yang dapat diakses oleh pengguna lalu lintas dan angkutan umum. Padahal pada Pasal 86 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan disebutkan bahwa "Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan." Responsivitas pemerintah khususnya dalam melakukan pelayanan masih kurang sesuai harapan, dan masalah lainnya karena masih banyak jalanan umum yang tidak terlewati angkutan umum penumpang.

Selanjutnya terhambatnya capaian ketepatan tujuan kebijakan pelayanan angkutan umum penumpang di Kota Cimahi dikarenakan berbagai sebab antara lain: kualitas data mengenai pengelolaan angkutan umum kurang lengkap, terbatasnya sumber daya (anggaran, fasilitas, SDM, kebijakan yang lebih relevan dan *update*), kurangnya pemahaman banyak pihak terhadap isi kebijakan pelayanan angkutan umum penumpang, kurang maksimalnya tahap perencanaan/perumusan dalam mengkaji kebijakan yang diterbitkan, kurangnya kerjasama serta koordinasi di antara lembaga/dinas-dinas terkait di jajaran Pemkot Cimahi, isi kebijakan yang belum menjadikan angkutan umum penumpang sebagai prioritas dalam target pembangunan kota, persaingan bisnis angkutan umum penumpang konvensional dengan jasa layanan angkutan penumpang *online* yang banyak dikeluhkan tanpa menemukan solusi yang tepat, standarisasi tarif angkutan yang kurang dipatuhi pengemudi angkutan umum, menurunnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum penumpang yang dianggapnya semakin kurang berkualitas, penurunan jumlah penghasilan angkutan umum penumpang dari waktu ke waktu, dan implementasi kebijakan yang belum optimal serta minimnya sosialisasi kebijakan.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat pelayanan Angkutan Umum Penumpang di Kota Cimahi. Dalam mengatasi hambatan capaian efektivitas pengelolaan angkutan umum penumpang di Kota Cimahi, telah dilakukan banyak upaya dari implementor kebijakan, antara lain: dengan mendatangi ke perusahaan-perusahaan atau pemilik angkutan umum penumpang untuk mengecek kelengkapan administrasi khususnya bidang perizinan, melakukan intensitas sosialisasi kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap angkutan umum

penumpang, melakukan pendataan ulang dan operasi gabungan terhadap angkutan umum penumpang untuk mencegah dan mengurangi jumlah pelanggaran, penertiban PKL di bahu jalan yang mengganggu kelancaran lalu lintas, peningkatan kompetensi SDM di internal Dishub, dan peningkatan jumlah dan mutu sarana prasarana pendukung.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mencapai efisiensi pengelolaan pelayanan angkutan umum penumpang di Kota Cimahi, dilakukan beberapa upaya, antara lain: memberikan pemahaman tentang kebijakan melalui kegiatan sosialisasi, melakukan penyamaan perspektif antar instansi terkait melalui berbagai rapat koordinasi, pengelolaan data angkutan penumpang dan rekapitulasi angkutan umum penumpang yang masih beroperasi, penertiban jalur-jalur padat dan pembenahan terminal secara berkala, peremajaan kendaraan yang digunakan dalam pelayanan angkutan umum penumpang, peningkatan prasarana dan sarana yang ada menjadi lebih lengkap dan lebih baik, pengawasan lapangan yang dilakukan dengan lebih ketat, dan upaya penindakan secara tegas setiap terjadinya pelanggaran aturan yang berlaku.

Dalam memenuhi faktor kecukupan dari pelaksanaan kebijakan pelayanan angkutan umum penumpang khususnya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi telah dilakukan sejumlah upaya antara lain dengan: melakukan rapat-rapat koordinasi dengan semua lembaga terkait, melakukan pendekatan kepada penyelenggara dan pengemudi angkutan umum dalam rangka sosialisasi kebijakan, peningkatan sarana prasarana penunjang, peningkatan kompetensi SDM, dan peningkatan jumlah anggaran yang diajukan.

Sementara upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemerataan manfaat yang diberikan untuk kelompok-kelompok Angkutan Umum Penumpang di Kota Cimahi, antara lain: melakukan penambahan anggaran

operasional, menyusun rencana kerja yang baik yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang, melakukan koordinasi serta pembinaan dengan pemilik dan atau perusahaan pengelola angkutan umum, penyeragaman kualitas layanan kepada semua pihak yang membutuhkan, melakukan tambahan trayek angkutan umum penumpang tapi tanpa menambah jumlah kendaraan, peningkatan dan pengetatan pengawasan di lapangan.

Dalam meningkatkan ukuran capaian responsivitas pemerintah dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi untuk memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok angkutan umum penumpang di Kota Cimahi diperlukan pengkajian ulang kebijakan secara menyeluruh yang melibatkan semua *stakeholder* supaya kebijakan yang dikeluarkan tidak lagi memberatkan kelompok-kelompok tertentu yang menjadi objek regulasi, sosialisasi dan penampungan keluhan dan masukan masyarakat, dan menyusun perencanaan yang lebih matang terkait pelayanan angkutan umum penumpang. Upaya yang telah dilakukan dengan peningkatan koordinasi khususnya antara institusi terkait kebijakan, memberikan pembinaan manajemen operator angkutan umum penumpang, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana angkutan umum.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mencapai hasil (tujuan) yang benar-benar tepat dan berguna atau bernilai untuk angkutan umum penumpang di Kota Cimahi, dilakukan sejumlah upaya, di antaranya: pendataan masalah-masalah dalam pelayanan angkutan umum penumpang secara periodik dan berkelanjutan, penambahan anggaran dalam DIPA, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM melalui pemanfaatan tenaga honorer dan praktek kerja mahasiswa serta diklat sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran operasional angkutan umum, peningkatan

kegiatan sosialisasi kebijakan, dan peremajaan kendaraan angkutan umum penumpang yang sudah melewati ketentuan waktu.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan. Setelah pengolahan dan pengkajian data dengan mengacu kepada rumusan masalah dan proposisi tentang evaluasi kebijakan Penyelenggaraan Perhubungan dengan melakukan Studi Kasus pada pelayanan Angkutan Umum Penumpang di Kota Cimahi, faktor-faktor penghambat, dan upaya-upaya yang dilakukan para pelaksana kebijakan dalam mengatasi hambatanya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi kebijakan tentang penyelenggaraan perhubungan pada pelayanan angkutan umum penumpang di Kota Cimahi masih belum efektif dalam aspek kualitas, kuantitas, dan waktu layanan, serta belum efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, kebijakan masih belum cukup spesifik dalam mengatasi masalah, pemerataan manfaat belum merata, responsivitas pemerintah rendah, dan ketepatan tujuan kebijakan belum tercapai. Masalah dalam pelayanan angkutan umum penumpang di Kota Cimahi, seperti kurangnya prioritas pembangunan dan ketidakseimbangan antara biaya dan manfaat.

2. Faktor-faktor yang menghambat pelayanan angkutan umum penumpang di Kota Cimahi meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran pengemudi terhadap regulasi, birokrasi yang rumit, telatnya izin, dan persaingan antara angkutan konvensional dan *online*. Efisiensi terganggu oleh rendahnya disiplin berlalu lintas, tumpang tindih peraturan, dan kurangnya sumber daya. Kecukupan kebijakan masih kurang karena kurangnya kompetensi, sarana prasarana yang tidak memadai, dan kebijakan yang kurang spesifik. Pemerataan manfaat terkendala oleh anggaran yang terbatas dan perencanaan yang belum matang. Responsivitas pemerintah terhambat oleh kurangnya kesadaran petugas

lapangan, kurangnya kualitas sumber daya, dan prioritas rendah dari pemerintah terhadap sektor angkutan umum penumpang. Ketepatan tujuan kebijakan belum tercapai optimal karena masalah data, sumber daya yang terbatas, kurangnya koordinasi, isi kebijakan yang tidak sesuai, penurunan kualitas angkutan umum penumpang, implementasi yang belum optimal, dan kurangnya sosialisasi kebijakan.

3. Upaya-upaya Pemerintah Kota Cimahi dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat pelayanan Angkutan Umum Penumpang di Kota Cimahi diantaranya melakukan intensifikasi sosialisasi, pengawasan angkutan umum, pendataan ulang, peningkatan kompetensi SDM, dan perbaikan sarana prasarana. Untuk meningkatkan efisiensi sumber daya, mereka melakukan optimalisasi tugas, koordinasi antar instansi, pengelolaan data, peremajaan kendaraan, dan penegakan regulasi. Kecukupan kebijakan ditingkatkan melalui evaluasi berkelanjutan, sosialisasi yang lebih luas, perbaikan sarana prasarana, peningkatan kompetensi SDM, dan peningkatan anggaran operasional. Upaya untuk pemerataan manfaat mencakup koordinasi, sosialisasi, peningkatan sarana prasarana, peningkatan kompetensi SDM, dan peningkatan anggaran. Responsivitas pemerintah ditingkatkan melalui peningkatan sosialisasi, pengumpulan masukan masyarakat, perencanaan yang lebih matang, koordinasi institusi terkait, pembinaan operator angkutan umum, dan perbaikan sarana prasarana. Akhirnya, untuk mencapai ketepatan tujuan kebijakan, mereka melakukan pemantauan berkelanjutan, peningkatan anggaran, perbaikan kualitas dan kuantitas, peningkatan sarana prasarana, sosialisasi yang lebih baik, dan peremajaan kendaraan angkutan umum penumpang.

Saran. Berdasarkan masalah yang dapat diketahui berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Akademis :

a. Agar dilakukan pengembangan ilmu yang lebih luas dan spesifik di bidang kebijakan publik yang menyangkut masalah pelayanan angkutan umum penumpang karena merupakan masalah krusial yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

b. Diharapkan adanya studi khusus yang lebih mendalam mengenai pelayanan angkutan umum penumpang sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang lengkap dan berguna untuk kemajuan sektor pelayanan publik di bidang angkutan umum penumpang.

2. Praktis :

a. Operator angkutan umum penumpang, agar segera melakukan peremajaan fisik kendaraan umum penumpang yang sudah melewati batas ketentuan usia kendaraan dan kurang layak jalan dengan fasilitasi pemerintah dalam hal dana untuk penyediaan unit kendaraan baru melalui kerjasama dengan pihak penyelenggara jasa keuangan dengan sistem kredit ringan yang tidak memberatkan.

b. Para regulator agar melakukan perumusan kebijakan baru yang lebih spesifik mengatur tentang pelayanan angkutan umum penumpang yang lebih mengakomodir kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha angkutan umum dan lebih relevan dengan situasi dan kondisi saat ini dimana layanan angkutan umum penumpang diwarnai dengan maraknya penyedia jasa angkutan umum *online* berbasis aplikasi.

3. Kebijakan :

a. Impelementor kebijakan perlu melakukan tindakan tegas kepada para pengemudi angkutan umum penumpang yang masih banyak melanggar peraturan, serta terhadap pelaku usaha yang abai dalam pengurusan perizinan perhubungan.

b. Harus dilakukan penertiban kendaraan-kendaraan yang bukan angkutan umum penumpang resmi yang masih beroperasi di wilayah Kota Cimahi termasuk yang dilakukan oleh beberapa oknum TNI. Tindakan dapat diambil secara tegas dengan

koordinasi dan bekerjasama antara Dinas Perhubungan dengan Polisi Militer, Satpol PP, dan Kepolisian.

c. Peningkatan pengawasan kepada angkutan umum penumpang yang beroperasi di lapangan khususnya terhadap pengemudi cadangan tidak resmi dalam mengantisipasi terjadinya tindakan kriminal kepada penumpang dan masalah kriminal lainnya yang masih sering terjadi di Kota Cimahi.

d. Untuk tidak hanya mempersoalkan kehadiran layanan jasa angkutan umum penumpang *online* sehingga angkutan konvensional merasa kalah bersaing, tetapi para pemangku kebijakan disarankan untuk melakukan pengembangan Sistem Angkutan Umum Penumpang Pintar (*Smart Public Transportation*) dalam mengatasi masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Muslich Zainal. (2001). Sistem Manajemen Transportasi Kota. Yogyakarta: Abhiseka.
- Budiarjo, Miriam. (2000). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Indonesia.
- Danim, Sudarwan. (2004). Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
- Dunn, William N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Leo, Agustino. (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. CV. Bandung: Alfabeta.
- Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP. YKPN.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. (2009). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, Lexy J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya.
- Muchsin, dan Fadillah Putra. (2002). Hukum dan Kebijakan Publik (Analisis atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian Indonesia). Malang: Universitas Sunan Giri Surabaya bekerjasama dengan Averroes Press.
- Nasution, M. Nur. (2004). Manajemen Transportasi. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho Dwijowijoto, Ryant. (2004). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Salim, Abbas. (1993). Manajemen Transportasi. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Siagian. Sondang P. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi. Ulbert. (2003). Studi Tentang Ilmu Administrasi. Bandung: Sinar Baru Aglesindo.
- Stake, Robert E. (2005). Case Study Methods in Educational Research: Seeking Sweet Water. In R. M. Jaeger (Ed.) Complementary methods for research in education, 2nd Edition (pp, 401-414). Washington DC: American Educational Research Association.
- Subarsono AG,. (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudriamunawar, Haryono. (2010). Pengantar Studi Administrasi Pembangunan. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Sutedi, Adrian. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Aministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.
- Warpani, P. Suwardjoko. (2002). Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bandung: Penerbit ITB.
- _____. (1990). Merencanakan Sistem Perangkutan. Bandung: Penerbit ITB.
- Wibawa, Samodra dkk. (2003). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. (2001). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.
- Zenju, Nandang Saefudin. (2008). Administrasi Publik. Surabaya: Kita Press.
- Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan
- Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan
- Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 551/ Kep. 1611- Dishub/ 2019 Tentang Jaringan Trayek Perkotaan Di Wilayah Kota Cimahi